

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, masyarakat selalu memiliki tuntutan baru, dan keinginan ini terus bertambah setiap hari. Setiap aspek kehidupan nasional dan lokal, sosial, politik, ekonomi, kesehatan, budaya, dan teknologi informasi tidak diragukan lagi telah dipengaruhi oleh globalisasi.

Mengikuti negara-negara yang maju, negara berkembang mulai berupaya mengejar status mereka dalam mencapai kesejahteraan warganya Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pemerintah sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan memiliki tugas yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, paragraf keempat, menguraikan syarat paling mendasar yang harus dipenuhi dalam hal kesejahteraan umum. Pemerintah sebagai pihak yang berkuasa berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

Tujuan utama dari keberadaan pemerintah adalah untuk memastikan adanya sistem ketertiban yang memungkinkan masyarakat menjalani hidup dengan baik. Pemerintah tidak ada untuk kepentingan individu, tetapi untuk melayani rakyat, terwujudnya situasi yang diinginkan setiap individu dalam masyarakat dapat berkembang melalui kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama. Hal ini dinyatakan oleh Rasyid dalam Muhadam Labolo, 2011:35.

Pemerintah merupakan jaringan lembaga atau organisasi yang strategis bagi kebutuhan dan kehidupan masyarakat karena fungsinya yang sangat luas dalam mengatur dan melayani masyarakat. Pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur, dengan luas wilayah 5,7 ribu km² dan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa. Kabupaten Banyuwangi memiliki 189 desa, 28 kelurahan, dan 25 kecamatan. Untuk mencapai desa terjauh, yang berjarak sekitar 200 kilometer dari pusat pemerintahan, diperlukan waktu hampir empat jam. Kondisi ini mengakibatkan

berbagai permasalahan pelayanan yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi kabupaten yang terdiri dari desa-desa dan dusun-dusun terpencil.

Masalah pelayanan publik di desa-desa masih menjadi isu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai masalah yang muncul, seperti 1) banyaknya pengaduan terkait pelayanan dasar.

Keluhan yang paling umum mencakup pelayanan kependudukan, layanan kesehatan, dan masalah lain yang berkaitan dengan lama proses, prosedur yang rumit, serta sikap petugas yang tidak bersahabat. 2) Terdapat ketidaksetaraan dalam layanan pendidikan, di mana warga desa masih kesulitan mendapatkan informasi tentang pendidikan dan akses terhadap bahan bacaan yang terbatas. 3) Ketidaksetaraan dalam layanan ekonomi pun terlihat, di mana penduduk desa memiliki akses yang minim terhadap pelatihan dan menghadapi tantangan terkait produktivitas ekonomi mereka.

Situasi seperti ini digunakan sebagai dasar oleh Pemerintah Banyuwangi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dalam memberikan layanan, pemerintah tidak berusaha sendiri untuk mencapai tujuannya. Penyediaan layanan kepada masyarakat melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan pelayanan publik yang tepat guna melaksanakan undang-undang. Hal ini menjamin pemerataan pelayanan dan menjangkau daerah pedesaan yang masih memiliki kesenjangan pelayanan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin menegaskan hal ini. Pemahaman ini bermuara pada kesimpulan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah diberikan kewenangan untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan penduduknya. Bagi pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting.

Ide tentang pengembangan Smart Village tidak hanya melihat

pemanfaatan teknologi terkini, namun juga berusaha untuk memperbaiki keadaan desa agar lebih makmur dan sejahtera. Usaha ini dilakukan dengan cara mengelola sumber daya yang ada dengan baik dan berkelanjutan. Smart Village adalah bagian penting dari kemajuan kota Cerdas.

Desa sebagai unit pemerintah terkecil sangat membutuhkan pembaruan dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat kemajuan kota cerdas (Aditama, 2018; Badri, 2016; Mayoan, 2016).

Karakteristik wilayah desa, budaya, masyarakat yang homogen, menjadi suatu alasan bahwa pengembangan wilayah desa tidak dapat disamakan dengan lingkup kota dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desa mampu menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa (Herdiana, 2019).

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang pengintegrasian program kerja berbasis desa/kecamatan melalui smart village. Pada tanggal 31 Mei 2016, telah diluncurkan inisiatif smart village melalui peraturan bupati tersebut.

Melalui sistem manajemen informasi, pemerintah desa, lembaga paling mendasar dihubungkan dengan pemerintah kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari program Smart Kampung. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis serat optik, usaha ekonomi inovatif, usaha ekonomi produktif, kemajuan di bidang kesehatan dan pendidikan, serta inisiatif pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan merupakan bagian dari pembangunan desa terpadu ini.

Sejak program ini dimulai, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mendirikan 23 desa dan 18 kelurahan sebagai proyek percontohan smart kampung. Saat ini, mereka juga sedang mempersiapkan 176 desa lainnya untuk beralih menjadi desa smart kampung (Sumber : banyuwangikab.go.id).

Salah satu desa yang dijadikan proyek percontohan smart kampung adalah

Desa Kampunganyar. Desa ini secara langsung ditunjuk oleh Bupati Banyuwangi pada tahun 2016 sebagai tempat peluncuran program smart kampung. Desa Kampunganyar termasuk dalam inisiatif pemerintah Banyuwangi untuk memajukan wilayah dengan fokus pada pengembangan desa terlebih dahulu.

Sebelum program smart kampung diimplementasikan di Kampunganyar, desa ini terletak sekitar 20 km dari pusat administrasi kota. Hal ini menyebabkan banyak masalah dalam penyelenggaraan layanan publik. Sebagian besar masalah yang muncul adalah karena layanan masih dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu lama, dengan prosedur yang tidak jelas dan rumit. Masyarakat sering kali harus berkendara jauh menuju pusat kota, dan ada kalanya pemerintah desa meminta biaya tertentu, sehingga muncul istilah "layanan mudah jika ada uang." Kondisi fisik kantor Desa Kampunganyar yang sepi dan kurang terawat membuat warga enggan untuk mengunjungi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di sana. Oleh karena itu, kantor desa tidak dapat beroperasi dengan efektif. Di sisi lain, sektor pembangunan di desa ini juga pernah mengalami situasi yang sangat mengenaskan. Jalan-jalan yang dalam kondisi rusak dan kurangnya penerangan di jalan utama menyebabkan Desa Kampunganyar jarang dikunjungi oleh wisatawan yang ingin mendaki Gunung Ijen, padahal desa ini berada di lereng Ijen. Minimnya sarana umum dan banyaknya potensi desa yang belum dikelola membuat Desa Kampunganyar tidak dikenal luas. Rendahnya tingkat kemampuan sumber daya manusia, baik di pihak pemerintah desa maupun di masyarakat, berkontribusi pada kurangnya penggunaan teknologi informasi.

Selain itu, Desa Kampunganyar juga menghadapi masalah ketimpangan antara pendidikan dan ekonomi. Warga desa masih kesulitan mendapatkan akses ke bahan bacaan dan internet, yang penting untuk mendukung kegiatan belajar mereka. Selain itu, akses ke pelatihan dan pemasaran produk ekonomi mereka melalui internet juga sangat terbatas. Akibatnya, usaha masyarakat di

Desa Kampunganyar sebelumnya jarang diketahui orang banyak.

Program ini menciptakan pandangan baru untuk masyarakat desa dan perangkatnya. Kampunganyar yang menjadi desa proyek percontohan dan lokasi peluncuran program, melakukan berbagai perubahan. Ini termasuk perubahan fisik, inovasi program, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk masyarakat dan pemerintah desa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu Desa Kampunganyar dalam melaksanakan Program Smart Kampung. Seiring berjalannya waktu, program Smart Kampung Desa Kampunganyar mengalami sejumlah kendala sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal. Salah satu lembaga yang bertugas melaksanakan Program Smart Kampung di Desa Kampunganyar adalah Desa Kampunganyar.

Kini setelah Program Smart Village berjalan selama hampir sembilan tahun, tentu saja telah meningkatkan pelayanan kepada warga Desa Kampunganyar. Kami tengah menggarap proyek pembangunan yang diberi nama "Implementasi Program Smart Village dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi" sesuai dengan justifikasi yang telah dibahas sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Memiliki beberapa rumusan masalah yang membantu kegiatan penelitian sangat penting saat melakukan penelitian. Pembahasan masalah membantu memperjelas fokus utama perdebatan pada beberapa area. Penulis menguraikan sejumlah isu, khususnya yang berikut ini, berdasarkan konteks yang dijelaskan sebelumnya.

1. Seberapa baik layanan publik Desa Kampunganyar ditingkatkan dengan penerapan Program Kampung Pintar?
2. Apa saja elemen yang memfasilitasi dan menghambat penerapan Program Kampung Pintar di Desa Kampunganyar?

C. Tujuan

Agar suatu tindakan dapat berhasil, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan mengapa tindakan tersebut dilakukan dan untuk diteliti lebih lanjut; tentu saja, tujuan ini harus sejalan dengan bagaimana masalah tersebut dirumuskan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan Program Smart Kampung di Desa Kampunganyar.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Smart Kampung di Desa Kampunganyar.

D. Manfaat

Diharapkan pengembangan proyek ini akan memberikan dampak yang menguntungkan. Berikut ini adalah kontribusi yang ingin dicapai dari inisiatif ini:

1. Manfaat Bagi Masyarakat dari Segi Sosial dan Ekonomi

Pengembangan Ekonomi Lokal: Dengan akses yang lebih baik ke informasi tentang pasar, kesempatan kerja, dan teknologi untuk usaha, perekonomian daerah dapat berkembang lebih cepat. Usaha kecil dan menengah (UKM) dapat menggunakan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan bersaing

Menciptakan Lapangan Kerja Baru: Pelaksanaan Smart Kampung juga memberikan kesempatan untuk membuat pekerjaan baru, terutama dalam sektor teknologi informasi, manajemen data, dan layanan yang berbasis digital.

Penyebaran Informasi dan Pengetahuan: Teknologi membuat orang bisa mendapatkan informasi tentang program-program sosial dan ekonomi yang dapat membantu kemajuan ekonomi di desa.

Pembangunan Berkelanjutan: Melalui penerapan Smart Kampung, komunitas bisa lebih mudah menemukan solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang berperan dalam keberlanjutan sosial dan ekonomi

2. Manfaat Bagi Pemerintah Desa Kampunganyar

Efisiensi Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya: instansi baik pemerintah maupun swasta dapat menggunakan teknologi untuk lebih efektif dalam mengatur data dan sumber daya, serta menyediakan layanan yang lebih terarah.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Implementasi Smart Kampung dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan organisasi terkait.

Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Baik: Dengan penggunaan teknologi, pemerintah dan organisasi dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program atau kebijakan di tingkat desa, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

3. Dampak Jangka Panjang

Proyek Smart Kampung seringkali disertai dengan perbaikan infrastruktur dasar seperti koneksi internet, penerangan jalan umum, atau fasilitas yang lainnya, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mengurangi kesenjangan digital antara desa dan kota, proyek ini dapat mempercepat pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah.